ANALISIS RASIO KESERASIAN BELANJA MODAL DAN OPERASIONAL SERTA RASIO EFEKTIVITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BANDUNG

Author:
Riswati[1], Yazid Bukhori[2]
Affiliation:
Institut Pemerintahan Dalam Negeri[1]
Jl. Raya Bandung - Sumedang KM. 20, Cibeusi, Kecamatan Jatinangor,
Kabupaten Sumedang, Jawa Barat
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat[2]
Jl. Raya Padalarang - Cisarua KM. 2, Mekarsari, Kecamatan Ngamprah,
Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat
Email:
riswati@ipdn.ac.id[1], yazidbukhori769@gmail.com[2]

Abstract

Financial performance is an achievement of the implementation of financial management within a period of time. Analysis of the financial performance of the public sector is important to find out how the government is performing as well as a form of accountability in regional financial management. This article analyzes the expenditure compatibility ratio consisting of operating expenditure and capital expenditure and the effectiveness ratio of PAD from the Bandung City Government in the 2020 and 2021 fiscal years. The model used in this research is qualitative research using literature study techniques. The results of this study indicate that the ratio of the compatibility of operational expenditures of the Bandung City Government has decreased by 0.69% from 2020 which was 86% of total regional expenditure to 85.31% in 2021 even though in realization, total operating expenditure and total regional expenditure as a whole have increased. This is due to an increase in the percentage of the Bandung City Government's capital expenditure compatibility ratio which increased by 2.38% to 12.71% from the previous year which was only 10.33%, which affected the Bandung City Government's operational expenditure compatibility ratio. Meanwhile, for the PAD effectiveness ratio, the Bandung City Government consistently received the title "effective" with a figure of 91.12% in 2020 and 91.13% in 2021 even though the budget and realization in 2021 have increased when compared to the 2020 fiscal year.

***Keywords**: Financial Perfomance, the expenditure compatibility ratio, the effectiveness ratio of PAD*

Abstrak

Kinerja keuangan merupakan suatu capaian dari pelaksanaan pengelolaan keuangan dalam suatu kurun waktu. Analisis terhadap kinerja keuangan sektor publik menjadi penting untuk mengetahui bagaimana kinerja Pemerintah serta wujud akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Artikel ini menganalisis rasio keserasian belanja yang terdiri dari belanja operasioal dan belanja modal serta rasio efektivitas PAD dari Pemerintah Kota Bandung pada tahun anggaran 2020 dan 2021. Model yang digunakan dalam penelitian ini

adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa rasio keserasian belanja operasional Pemerintah Kota Bandung mengalami penurunan sebesar 0.69% dari tahun 2020 yang berada di angka 86% dari total belanja daerah menjadi sebesar 85,31% pada 2021 meskipun secara realisasi, total belanja operasioal dan total belanja daerah keseluruhan mengalami peningkatan. Hal tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan persentase rasio keserasian belanja modal Pemerintah Kota Bandung yang meningkat sebesar 2,38% menjadi 12,71% dari tahun sebelumnya yang hanya 10,33% sehingga berpengaruh pada rasio keserasian belanja operasional Pemerintah Kota Bandung. Sedangkan untuk rasio efektivitas PAD Pemeritnah Kota Bandung konsisten mendapatkan predikat "efektif" dengan angka 91,12% pada 2020 dan 91,13% pada 2021 meskipun anggaran dan realisasi pada 2021 mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun anggaran 2020.

Kata Kunci : Kinerja Keuangan, Rasio keserasian, Rasio Efektivitas PAD

PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah di Indonesia diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola keuangan di lingkup daerahnya masing – masing berdasarkan peraturan perundang – undangan. Selanjutnya, tiap tiap Pemeritnah Daerah berkewajiban untuk menyusun dan melaporkan laporan keuangan Pemerintah Daerah yang diterbitkan disetiap tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan keuangan oleh Pemerintah Daerah bersangkutan. Secara peraturan, setidaknya terdapat 7 (tujuh) bentuk laporan keuangan yang harus disusun dan dilaporkan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia yang terdiri atas Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). Berdasarkan beberapa format laporan keuangan tersebut selanjutnya dapat dijadikan dasar untuk analisis yang ditujukan untuk mengetahui sejauhmana dan bagaimana kinerja Pemerintah Daerah bersangkutan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Penelitian dalam jurnal ini dimaksudkan untuk meneliti dan menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung dengan menggunakan rasio keserasian dan juga rasio efektivitas PAD. Diharapkan dengan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang bagaimana Pemerintah Kota Bandung melaksanakan dan mengelola keuangan daerah yang didasarkan pada data – data yang didapatkan dalam laporan keuangan tahunan yang diterbitkan.

Laporan keuangan sendiri dibuat sebagai suatu informasi yang bertujuan memberikan gambaran terkait posisi, arus kas, serta kinerja keuangan dari pemerintah daerah bersangkutan yang tentunya memiliki manfaat bagi pengguna laporan dalam mempertimbangkan dan membuat keputusan maupun kebijakan (Deswira, 2022). Laporan keuangan yang tentunya berisi informasi terkait kinerja keuangan pemerintah daerah bersangkutan masih perlu untuk diolah menggunakan beberapa metode dalam analisis kemampuan ataupun kinerja dari keuangan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk

mendapatkan gambaran yang lebih detail dari kinerja keuangan Pemerintah Daerah menggunakan beberapa metode dalam analisis data yang setidaknya diantaranya terdiri atas analisis pada tingkat rasio kemandirian keuangan daerah, rasio pertumbuhan keuangan daerah, rasio keserasian belanja modal dan operasional, serta rasio efektivitas pendapatan asli daerah (Halim, 2004).

Penelitian dan artikel ini ditulis dalam rangka menilai kinerja keuangan dari Pemerintah Kota Bandung dengan menggunakan empat rasio dalam analisis keuangan daerah oleh (Halim, 2004) diatas. Pada penelitian ini diteliti terkait analisis rasio keserasian belanja modal dan operasional serta rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD). Penelitian ini juga sejatinya merupakan lanjutan dan ditujukan untuk melengkapi penelitian sebelumnya yang juga dilaksanakan untuk mengukur rasio kemandirian keuangan daerah serta rasio pertumbuhan keuangan daerah Pemerintah Kota Bandung oleh (Runjung, Primastuti, & Riswati, 2022).

KAJIAN PUSTAKA

Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan daerah merupakan suatu ukuran dalam pengukuran kinerja yang menggunakan beberapa indikator yang didasarkan pada keuangan daerah. Terdapat beberapa alat atau metode yang dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan daerah. Hal tersebut digunakan untuk mengukur akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah (Sartika, 2019). Selain itu, kinerja keuangan juga dapat dipahami sebagai suatu analisis yang dilaksanakan dengan maksud untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran tentang sejauhmana suatu organisasi baik itu privat ataupun publik melaksanakan pengelolaan keuangannya (Fahmi, 2012). Kemudian kinerja keuangan dari segi output juga dapat dipahami sebagai suatu hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh suatu manajemen dalam organisasi yang menjalankan fungsi dan tugasnya dalam hal pengelolaan aset termasuk didalamnya mencakup aspek keuangan dalam suatu periode tertentu (Rudianto, 2013). Dalam penelitian ini, aspek kinerja keuangan yang diteliti difokuskan pada sektor publik, yaitu pada Pemerintah Kota Bandung. Sehingga sebagai hasil dari penelitian ini harapannya dapat memberikan informasi tentang seberapa baik kinerja pengelolaan keuangan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung selama periode tertentu.

Analisis Kinerja Keuangan

Analisis kinerja keuangan dapat berarti menguraikan serangkaian pos – pos yang terdapat dalam laporan keuangan menjadi unit – unit informasi yang lebih kecil serta dapat dilihat pola hubungannya yang sifatnya signifikan atau memiliki makna diantara satu dengan lainnya baik antara data yang sifatnya kuantitatif ataupun non-kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui sejauhmana kinerja dan kondisi dari keuangan Pemerintahan Daerah bersangkutan yang pada akhirnya dijadikan dasar dalam menetapkan keputusan (Harahap, 2006). Bagi organisasi yang bergerak di sektor privat, model analisis

yang biasa digunakan adalah rasio likuiditas yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memehuni kewajibannya dengan segera atau dalam jangka waktu pendek., rasio *leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan dana yang dimiliki dan disediakan oleh pemilik dengan dana yang dipinjam dari kreditur, rasio aktivitas yang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektif atau tidaknya perusahaan dalam menggunakan serangkaian sumber daya yang dimiliki, serta rasio profitabilitas yang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba/keuntungan (Susanti, Riadi, & Sari, 2020).

Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam mengukur dan menganalisis kinerja keuangan dari Pemerintahan Daerah di Indonesia. Beberapa metode yang umum digunakan untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintahan Daerah adalah rasio efektifitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio keserasian, rasio pertumbuhan, dan rasio kemandirian keuangan daerah (Qur'aini & Panggiarti, 2021). Rasio keserasian pada umumnya dianggap mampu memberikan gambaran tentang bagaimana Pemerintah Daerah memberikan prioritas pada alokasi penganggaran dan pembiayaan pada dua belanja, yaitu belanja operasi dan juga belanja modal. Dengan semakin tingginya persentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasional maka belanja modal yang sejatinya ditujukan untuk penyediaan sarana prasarana publik bagi masyarakat akan semakin kecil (Halim & Kusufi, 2014). Rasio efektivitas pendapatan asli daerah digunakan digunakan untuk memberikan gambaran secara khusus kepada pelaksanaan otonomi daerah yang dalam hal ini berarti pada pelaksanaan pendapatan yang sumbernya dari daerah (Abdulaziz, 2021).

METODE

Model Penelitian

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah model penelitian kualitatif yang dilaksanakan untuk meneliti suatu kondisi ilmiah yang menjadikan penelitia sebagai instrumen penting dalam penelitian (Sugiyono, 2017). Penelitian ini juga menggunakan konsep studi kepustakaan yang menekankan langkah penting dalam menetapkan suatu topik dalam penelitian yang kemudian dikaji secara teoritis dan memadukan hasil temuan yang ada dengan berbagai referensi yang terkait dengan penelitian yang dilaksanakan (Sugiyono, 2017).

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Pemeirntah Daerah (LKPD) yang terdiri atas data APBD, laporan realisasi anggaran, dan laporan operasional dari Pemerintah Kota Bandung pada tahun anggaran 2020 dan 2021.

Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data berupa rasio keserasian yang terdiri atas rasio keserasian belanja operasional dan rasio keserasian belanja modal serta rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD). Adapun rasio belanja operasional merupakan perbandingan dari total belanja opeasional suatu Pemerintah Daerah yang dibagi dengan total belanja daerah dalam satu tahun anggaran yang sama. Rasio ini memberikan gambaran kepada pembaca terkait porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk operasional Pemerintahan Daerah bersangkutan. Pada umumnya porsi dari belanja operasional mendominasi total belanja daerah dikisaran 60-90%. Pemerintah Daerah dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi disamping Pemerintah Daerah lainnya akan memiliki porsi belanja operasional yang lebih besar dibandingkan daerah dengan pendapatan daerah yang masih relatif rendah (Siregar & Mariana, 2020). Berikut ini adalah rumus dalam menghitung rasio keserasian belanja operasional (Mahmudi, 2010) :

$$\text{Rasio Keserasian Belaja Operasional} = \frac{\text{Total Belanja Operasional}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Selanjutnya, terdapat juga rasio keserasian belanja modal yang merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal yang dibagi dengan total belanja daerah Pemerintah Daerah bersangkutan dalam satu tahun anggaran yang sama. Dengan rasio keserasian belanja modal ini, pembaca dapat mendapatkan gambaran terkait porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk pembiayaan investasi dengan bentuk belanja modal yang bertujuan untuk memperkaya aset/barang milik daerah dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Belanja modal pada dasarnya bersifat jangka menengah hingga jangka panjang yang biasanya memiliki bobot sekitar 5-20% dari total belanja daerah suatu Pemerintah Daerah (Mahmudi, 2010). Berikut adalah rumus dalam mendapatkan rasio belanja modal (Mahmudi, 2010):

$$\text{Rasio Keserasian Belaja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Selain rasio keserasian belanja yang terdiri dari rasio keserasian belanja operasional dan rasio keserasian belanja modal, jurnal ini juga menggunakan analisis tingkat efektivitas pendapatan asli daerah (PAD) dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah. Rasio efektivitas PAD

menunjukan kemampuan suatu Pemerintah Daerah dalam merealisasikan target anggaran pendapatan asli daerah yang telah dituangkan dalam APBD dalam satu tahun anggaran (Zulkarnain, 2020). Berikut adalah rumus untuk menghitung rasio efektivitas pendapatan asli daerah:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Total Realisasi PAD}}{\text{Total Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil penghitungan menggunakan rumus tersebut selanjutnya angka yang didapatkan dikelompokan sesuai dengan kriteria yang diatur untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan Pemerintahan Daerah yang bersangkutan. Berikut adalah kriteria dari efektivitas kinerja keuangan Pemerintahan Daerah yang digunakan dalam penelitian ini:

Persentase Efektivitas	Kriteria Efektivitas
Diatas 100%	Sangat Efektif
90 – 100%	Efektif
80 – 90%	Cukup Efektif
60 – 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: (Sahdurin & Lindiawatie, 2023), diolah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian pembahasan ini akan dibagi kedalam dua, yaitu terkait dengan rasio keserasian belanja serta rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD). Berikut adalah pembahasannya:

A. Rasio Keserasian Belanja

Rasio keserasian pada jurnal ini meneliti terkait dengan rasio keserasian belanja operasional serta rasio keserasian belanja modal dari Pemerintah Kota Bandung.

1) Rasio Keserasian Belanja Operasional

Berikut ini adalah besaran rasio keserasian belanja operasional dari Pemerintah Kota Bandung pada Tahun Anggaran 2020 dan 2021 disampaikan pada tabel berikut:

Tabel 1.
Rincian Belanja Operasional, Total Belanja Daerah, dan Rasio Keserasian Belanja Operasional Pemerintah Kota Bandung

Keterangan	REALISASI		Peningkatan/ Penurunan
	2020	2021	
Belanja Operasional	Rp.4'650'334'229'661	Rp.4'841'595'685'018	4,11%
Total Belanja Daerah	Rp.5'407'125'732'054	Rp.5'675'599'520'638	4,97%
Rasio Keserasian Belanja Operasional	86%	85,31%	(0,69%)

Sumber: ppid.bandungkota.go.id (2023)

Berdasarkan pada data yang tersaji pada tabel diatas menunjukan bahwa secara umum, besaran belanja operasional dari Pemerintah Kota Bandung berada diatas angka 4,5 Triliun Rupiah pada 2020 dan 2021. Secara rinci, realisasi belanja operasional di Kota Bandung pada 2021 meningkat sebesar 4,11% atau berada pada nominal Rp. 4.841.595.685.018 dari tahun 2020 yang berada pada angka Rp. 4.650.334.229.661. Peningkatan juga terjadi pada total belanja daerah Pemerintah Kota Bandung pada tahun anggaran 2020 ke tahun 2021. Angka realisasi belanja daerah Pemerintah Kota Bandung pada tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 5.407.125.732.054 meningkat sebesar 4,97% pada tahun anggaran 2021 menjadi Rp.5.675.599.520.638. Kendati terdapat peningkatan pada jumlah total belanja operasional dan total belanja daerah Pemerintah Kota Bandung secara keseluruhan namun angka rasio keserasian belanja operasional Pemerintah Kota Bandung justru menurun dari sebesar 86% pada tahun 2020 turun menjadi 85,31% pada tahun 2021.

Penurunan rasio keserasian belanja operasional ditengah peningkatan pada total belanja operasional serta total belanja daerah di Kota Bandung menandakan bahwa total belanja selain operasional di Kota Bandung mengalami peningkatan yang lebih besar sehingga rasio belanja operasional di Kota Bandung menurun sebesar 0,69% pada tahun 2021 dari tahun sebelumnya. Meskipun secara persentase, belanja operasional di Kota Bandung tetap tinggi dengan tetap berada diatas angka 85% dalam 2 tahun terakhir. Penulis juga mengolah dan menyajikan data terkait persentase dari total belanja operasional Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2020 dan tahun 2021 dalam format diagram berikut:

Gambar 1.
Persentase Belanja Operasional Pemerintah Kota Bandung pada T.A 2020

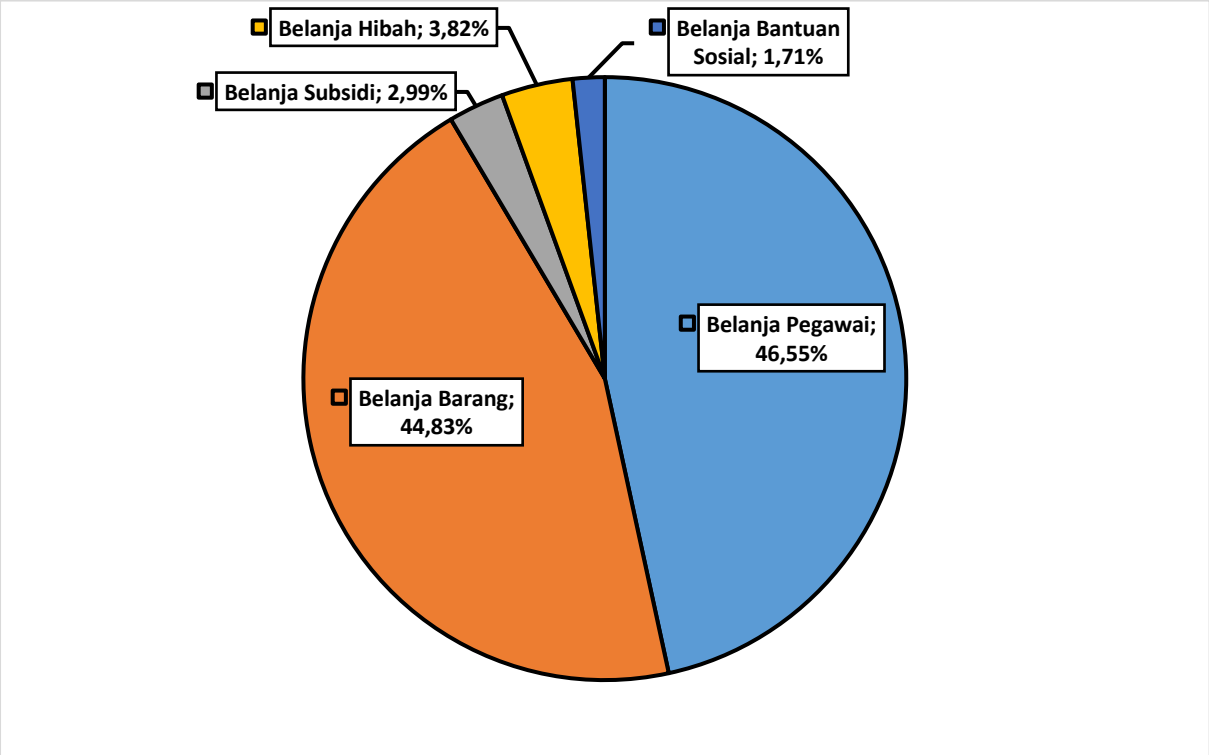

Sumber: ppid.bandungkota.go.id, diolah (2023)

Pada diagram terkait dengan rincian persentase belanja operasional Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2020 yang mencapai angka Rp. 4.650.334.229.661 atau sebesar 86% dari total belanja daerah Pemerintah Kota Bandung pada tahun anggaran yang sama dengan nominal sebesar Rp. 5.407.125.732.054. Belanja pegawai menjadi belanja dengan persentase terbesar sesuai dengan diagram diatas dengan angka mencapai 46,55% dari total belanja operasional Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2020. Kemudian belanja barang menjadi belanja dengan persentase tertinggi kedua dari total belanja operasional Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2020 dengan besaran mencapai angka 44,83%. Sedangkan untuk belanja hibah memiliki bobot sebesar 3,82%, belanja subsidi memiliki bobot sebesar 2,99% dan belanja bantuan sosial memiliki bobot paling kecil dari total belanja operasional Pemerintah Kota Bandung dengan 1,71%.

Pada tahun anggaran 2021, terdapat sedikit perbedaan dalam bobot belanja operasional dari Pemerintah Kota Bandung senada dengan peningkatan total angka belanja operasional dan juga total belanja daerah secara keseluruhan dari Pemerintah Kota Bandung dari tahun anggaran sebelumnya. Terkait dengan persentase belanja operasional dari Pemerintah Kota Bandung pada tahun anggaran 2021 disajikan dalam diagram berikut ini:

Gambar 2.
Persentase Belanja Operasional Pemerintah Kota Bandung pada T.A 2021

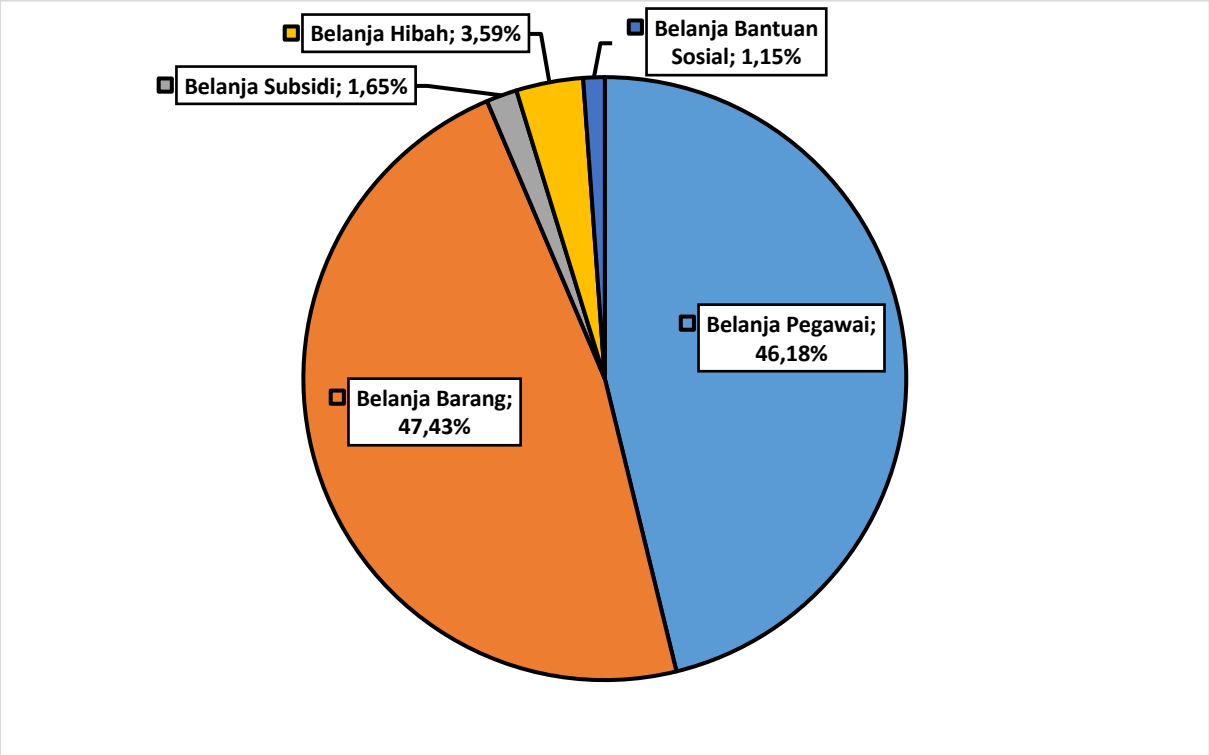

Sumber: ppid.bandungkota.go.id, diolah (2023)

Sesuai dengan yang tersaji dalam gambar diatas, menunjukan bahwa belanja barang menjadi belanja dengan bobot paling besar pada total belanja operasional Pemerintah Kota Bandung pada tahun anggaran 2021 dengan angka sebesar 47,43% dari total belanja operasional yang mencapai angka Rp. 4.841.595.685.018. Sedangkan pada posisi kedua adalah belanja pegawai yang memiliki bobot sebesar 46,18% dari total belanja operasional Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2021. Hal tersebut beberda dengan tahun anggaran 2020 dengan bobot belanja pegawai menjadi yang paling besar diikuti selanjutnya oleh belanja barang. Kemudian pada tahun 2021 juga belanja hibah masih berada pada urutan ketiga dengan persentase sebesar 3,59% dari total belanja operasional daerah baru kemudian belanja subsidi sebesar 1,65% dan belanja bantuan sosial sebesar 1,15% pada tahun anggaran 2021.

2) Rasio Keserasian Belanja Modal

Rasio keserasian belanja modal didapatkan dari pembagian antara total belanja modal pada satu tahun anggaran yang dibagi dengan total belanja daerah dalam satu tahun anggaran yang sama. Berikut adalah perhitungan terkait dengan rasio keserasian belanja modal dari Pemerintah Kota Bandung pada tahun anggaran 2020 dan 2021:

Tabel 2.
Belanja Modal, Total Belanja Daerah, dan Rasio Keserasian Belanja Modal Pemerintah Kota Bandung

Keterangan	REALISASI		Peningkatan/ Penurunan
	2020	2021	
Belanja Modal	Rp.558'480'387'618,00	Rp.721'566'424'793,00	29,20%
Total Belanja Daerah	Rp.5'407'125'732'054	Rp.5'675'599'520'638	4,97%
Rasio Keserasian Belanja Modal	10,33%	12,71%	2,38%

Sumber: ppid.bandungkota.go.id (2023)

Berdasarkan pada tabel diatas, menunjukan bahwa realisasi dari belanja modal Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2020 meningkat sebesar 29,20% dari yang awalnya sebesar Rp.558.480.387.618 pada 2020 menjadi sebesar Rp.721.566.424.793 pada tahun anggaran 2021. Senada dengan belanja modal, total realisasi belanja daerah Pemerintah Kota Bandung juga meningkat sebesar 4,97% dari tahun 2020 ke tahun 2021. Dari kedua hal tersebut, berdasarkan perhitungan untuk mengetahui besaran rasio keserasian belanja modal Pemerintah Kota Bandung maka didapatkan hasil bahwa pada tahun anggaran 2020, angka rasio keserasian belanja modal Pemerintah Kota Bandung adalah 10,33% sedangkan untuk tahun anggaran 2021 adalah sebesar 12,71% dari total belanja daerah Pemerintah Kota Bandung secara keseluruhan.

Peningkatan dari angka rasio keserasian belanja modal Pemerintah Kota Bandung sebesar 2,38% tersebut sejalan dengan peningkatan yang juga terjadi pada total belanja modal serta total belanja daerah Kota Bandung secara umum. Berbeda dengan angka rasio keserasian belanja operasional Pemerintah Kota Bandung yang mengalami penurunan sebesar 0,69% pada tahun 2020 ke tahun 2021, meskipun secara total belanja operasional dan total belanja daerah Pemerintah Kota Bandung meningkat. Meningkatnya angka rasio keserasian belanja modal di Pemerintah Kota Bandung pada tahun anggaran 2020 sebesar 10,33% menjadi 12,71% pada tahun anggaran 2021 menandakan bahwa terdapat peningkatan realisasi belanja modal yang signifikan oleh Pemerintah Kota Bandung. Untuk mengetahui rincian persentase belanja modal dari Pemerintah Kota Bandung, berikut disajikan dalam bentuk diagram:

Gambar 3.
Persentase Belanja Modal Pemerintah Kota Bandung pada Tahun Anggaran 2020

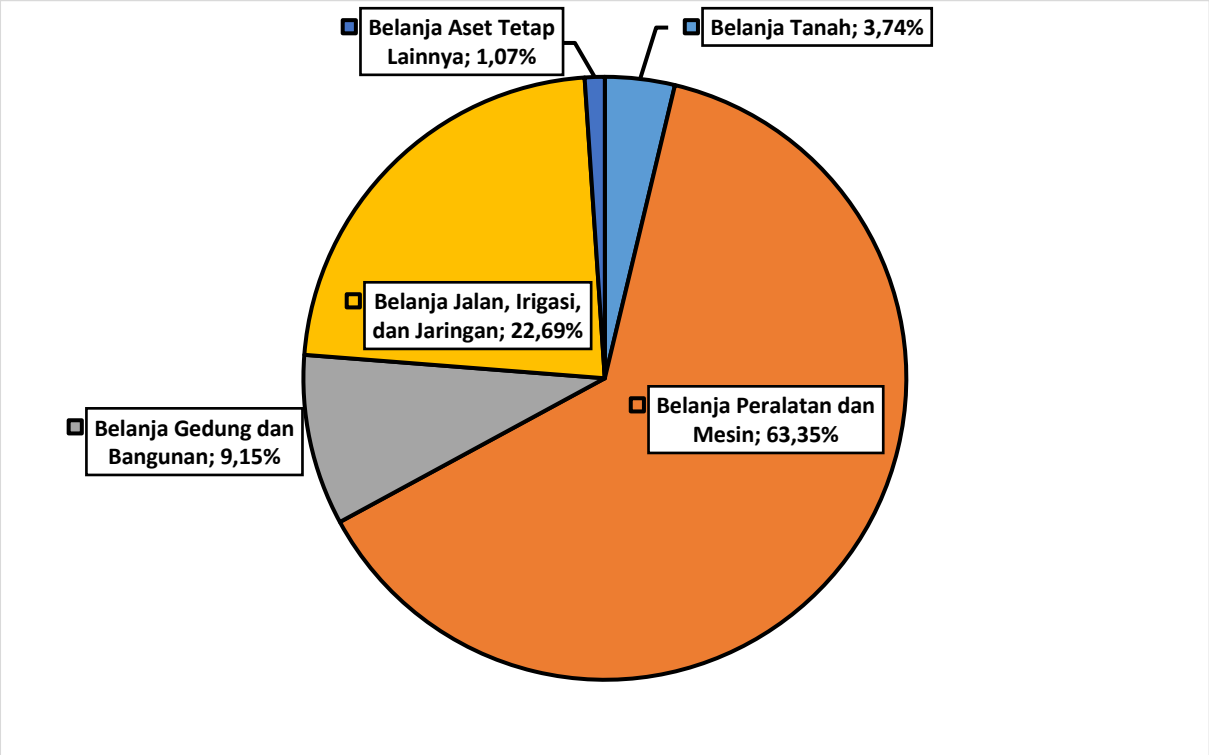

Sumber: ppid.bandungkota.go.id, diolah (2023)

Sesuai dengan yang tertera dalam diagram diatas menunjukan bahwa pada 2020 belanja peralatan dan mesin memiliki bobot paling tinggi pada total belanja modal Pemerintah Kota Bandung yang mencapai angka 63,35% dari total belanja modal yang sebesar Rp.558.480.387.618. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan berada diposisi kedua dengan bobot sebesar 22,69% dan belanja gedung dan bangunan berada diposisi selanjutnya dengan bobot sebesar 9,15%. Sedangkan untuk belanja tanah adalah sebesar 3,74% dan belanja aset tetap lainnya sebesar 1,07% dari total belanja modal Pemerintah Kota Bandung pada tahun anggaran 2020. Terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam persentase belanja modal oleh Pemeirntah Kota Bandung pada tahun anggaran 2021. Berikut adalah rinciannya:

Gambar 4.
Persentase Belanja Modal Pemerintah Kota Bandung pada Tahun Anggaran 2021

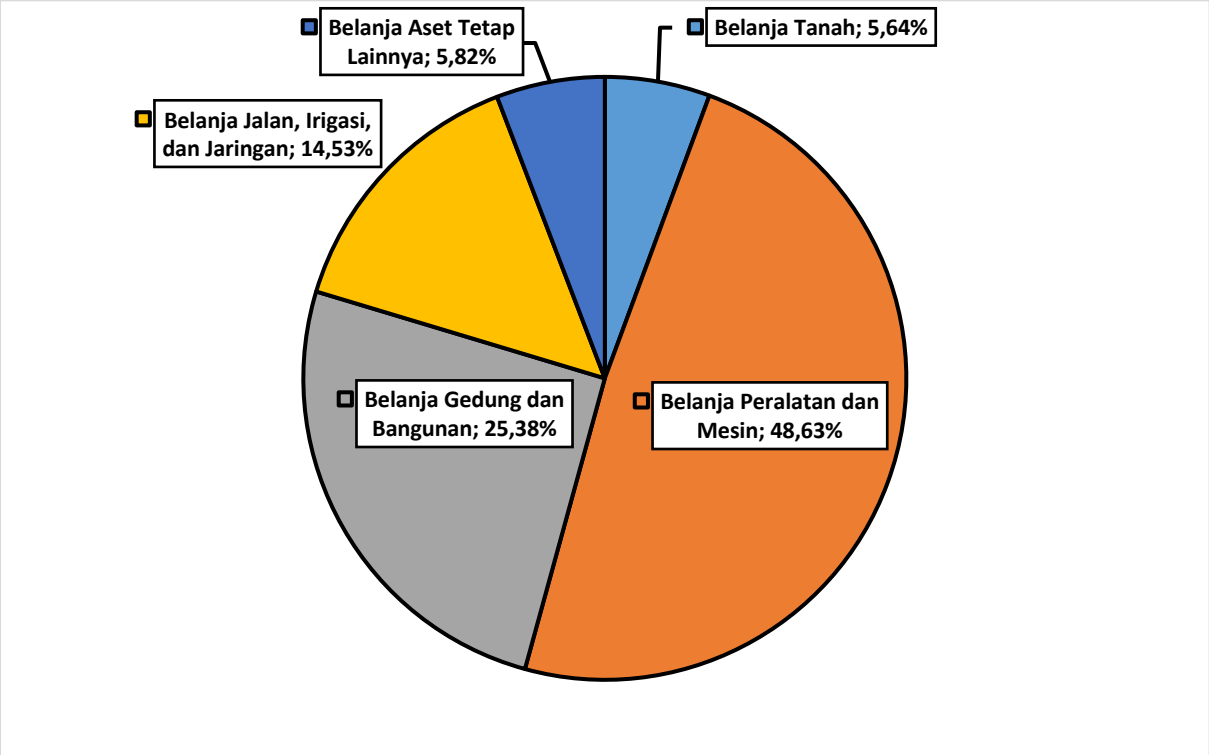

Sumber: ppid.bandungkota.go.id, diolah (2023)

Dari diagram diatas sudah dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan pada persentase belanja modal Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2021. Selain karena nominal realisasi belanja modal yang meningkat sebesar 29,20%, dari segi persentase pun berbeda. Belanja peralatan dan mesin masih menjadi belanja dengan bobot paling besar dari total belanja modal Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2021 yang mencapai 48,63% dari total belanja modal Pemerintah Kota Bandung yang mencapai angka Rp.721.566.424.793. Bobot belanja peralatan dan mesin tersebut tentu menurun sangat jauh apabila dibandingkan pada tahun 2020 yang mencapai angka 63,35% dari total belanja modal Pemerintah Kota Bandung pada 2020. Selain itu, belanja gedung dan bangunan menjadi bobot belanja terbesar kedua pada total belanja modal Pemerintah Kota Bandung dengan angka mencapai 25,38%. Hal tersebut berbeda dengan 2020 yang menempatkan belanja jalan, irigasi, dan jaringan pada posisi kedua dengan bobot sebesar 22,69% dari total belanja modal Pemerintah Kota Bandung pada 2020. Bobot belanja modal dengan persentase tertinggi ketiga pada 2021 adalah belanja jalan, irigasi, dan jaringan dengan bobot sebesar 14,53% dari total belanja daerah. Sedangkan untuk posisi keempat dan kelima adalah belanja aset tetap lainnya dengan 5,82% dan belanja tanah dengan bobot terkecil sebesar 5,64% dari total belanja modal Pemerintah Kota Bandung pada tahun anggran 2021.

B. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio selanjutnya yang diteliti dalam jurnal ini adalah rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD) yang didapatkan dengan cara membagi antara anggaran PAD dengan realisasi PAD di tahun anggaran yang sama. Dari metode menghitung rasio efektivitas PAD yang sudah dijelaskan pada pembahasan, maka berikut adalah anggaran dan realisasi PAD Pemerintah Kota Bandung pada tahun anggaran 2020 dan 2021:

Tabel 3
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pemerintah Kota Bandung 2020 dan 2021

Keterangan	2020		2021	
	APBD	REALISASI	APBD	REALISASI
Pendapatan Asli Daerah	2'264'814'094'039	2'063'783'773'735	2'409'804'328'188	2'195'971'884'100

Sumber: ppid.bandungkota.go.id (2023)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari tahun anggaran 2020 hingga 2021, pendapatan asli daerah Kota Bandung konsisten berada diatas angka 2 Triliun Rupiah. Pada tahun 2020, PAD dianggarkan sebesar Rp. 2.264.814.094.039 kemudian meningkat pada tahun anggaran 2021 menjadi sebesr Rp. 2.409.804.328.188 yang dianggarkan. Sedangkan untuk realisasinya, pada tahun anggaran 2020 realisasi PAD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung berada pada angka Rp.2.063.783.773.735 dan kembali meningkat pada tahun anggaran 2021 dengan realisasi PAD yang mencapai angka Rp.2.195.971.884.100. Sesuai dengan perhitungan yang digunakan untuk mengetahui rasio efektivitas PAD di Pemeritah Kota Bandung, berikut ini adalah hasilnya:

Tabel 4
Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Bandung
Tahun Anggaran 2020 dan 2021

Tahun	Angka Efektivitas PAD	Predikat
2020	91,12%	Efektif
2021	91,13%	Efektif

Sumber: ppid.bandungkota.go.id (2023)

Berdasarkan pada tabel diatas maka dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas PAD dari Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2020 dan 2021 konsisten berada diatas 90% dengan rincian sebesar 91,12% pada 2020 dan 91,13% pada 2021. Meskipun apabila dipandang dari segi penganggaran dan segi realisasi pendapatan asli daerah di Kota Bandung mengalami peningkatan pada tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 akan tetapi angka efektivitas PAD Pemerintah Kota Bandung tetap berada pada kategori “efektif” sesuai dengan kriteria efektivitas PAD yang sudah dijelaskan sebelumnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan pada jurnal ini maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang didapatkan. Pada rasio keserasian, rasio keserasian belanja operasional Pemerintah Kota Bandung mengalami penurunan sebesar 0,69% dari tahun 2020 ke tahun 2021. Meskipun total belanja operasional Pemerintah Kota Bandung pada 2020 dan 2021 mengalami peningkatan serta total belanja daerah secara umum juga mengalami peningkatan, tetapi rasio keserasian belanja operasional justru turun. Hal tersebut disebabkan terdapat peningkatan dari bobot belanja lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung sehingga rasio keserasian belanja daerah Pemerintah Kota Bandung lebih kecil pada 2021 dibandingkan 2020 meskipun secara nominal meningkat. Hal yang berbeda terjadi pada rasio keserasian belanja modal Pemerintah Kota Bandung. Total belanja modal Pemeirntah Kota Bandung pada 2020 meningkat mencapai angka 29,20% pada 2021 menjadi sebesar Rp.721.566.424.793 dari yang sebelumnya sebesar Rp.558.480.387.618. Selaras dengan hal tersebut, total belanja daerah Pemerintah Kota Bandung juga mengalami peningkatan sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Namun, rasio keserasian belanja modal Pemerintah Kota Bandung mengalami peningkatan sebesar 2,38% dari pada tahun 2021 dari tahun 2020 yang hanya berada pada angka 10,33%. Peningkatan rasio keserasian belanja modal tersebut terjadi karena memang terdapat peningkatan pada realisasi anggaran belanja modal Pemerintah Kota Bandung.

Peningkatan anggaran realisasi belanja modal tersebut juga yang menjadi penyebab rasio keserasian belanja operasional Pemerintah Kota Bandung mengalami penurunan. Sedangkan untuk rasio efektivitas PAD, Pemerintah Kota Bandung berhasil secara konsisten untuk mempertahankan rasio efektivitas PAD pada angka diatas 90% dengan predikat “efektif” dengan rincian sebesar 91,12% pada 2020 dan 91,13% pada 2021 kendati terjadi peningkatan pada anggaran dan realisasi pendapatan asli daerah Pemerintah Kota Bandung.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulaziz, N. S. (2021). Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Kota Surabaya. *Jurnal Inovasi Penelitian*, *1*(8), 1575–1580.

Deswira, A. (2022). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, *17*(1), 72–88.

Fahmi, I. (2012). *Analisis Kinerja Keuangan*. Bandung: Alfabeta.

Halim, A. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

Harahap, S. S. (2006). *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo.

Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta: STIE YKPN.

Qur’aini, S., & Panggiarti, E. K. (2021). Analisis Rasio Keuangan Daerah sebagai Penilaian Kinerja

pada Pemerintahan Kota Magelang. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, *5*(1), 60–70.

Rudianto. (2013). *Akuntansi Manajemen Informasi untuk Pengambilan Keputusan Strategis*. Jakarta: Erlangga.

Runjung, R. M. R. P. K., Primastuti, A., & Riswati. (2022). Analisis Tingkat Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Keuangan Pemerintah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Publik (JEKP)*, *9*(2), 96–111.

Sahdurin, & Lindiawatie. (2023). Analisis Tingkat Kemandirian dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Bima. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, *7*(1).

Sartika, N. (2019). Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti. *Inovbis: Jurnal Inovasi Bisnis*, *7*, 147–153.

Siregar, A. O. D., & Mariana, I. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan (Studi Kasus: Pemerintahan Kota Depok - Jawa Barat). *Journal IMAGE*, *9*(1), 1–19.

Sugiyono. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Susanti, A., Riadi, S., & Sari, D. (2020). Analisis Rasio Keserasian Belanja Pada Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. *Jurnal Ilmu Manajemen Saburai*, *8*(1), 11–18.

Zulkarnain, Z. (2020). Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. *CAKRAWALA - Repositori IMWI*, *3*(1), 63–74.